LAPORAN KINERJA KEPALA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP) KECAMATAN NGLUYU

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN NGLUYU

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngluyu Tahun 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Ngluyu Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Ngluyu dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Ngluyu. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Camat Ngluyu

IMAM TARMUJI, S.Sos
Pembina Tk. 1
NIP. 19690915 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum
b. Maksud dan Tujuan
c. Landasan Hukum
d. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
e. Isu-isu Strategis *(Strategic Issued)* yang sedang dihadapi Organisasi
f. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Ikhtisar / Ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A. 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;

A. 2. Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

A. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

A. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang Berbatasn);

A. 5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

A. 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

A. 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029).
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA).

4. Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / *outcome* OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good govermance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatuperencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Ngluyu Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Ngluyu bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholder).*

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Ngluyu merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi - instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

1.3 LANDASAN HUKUM

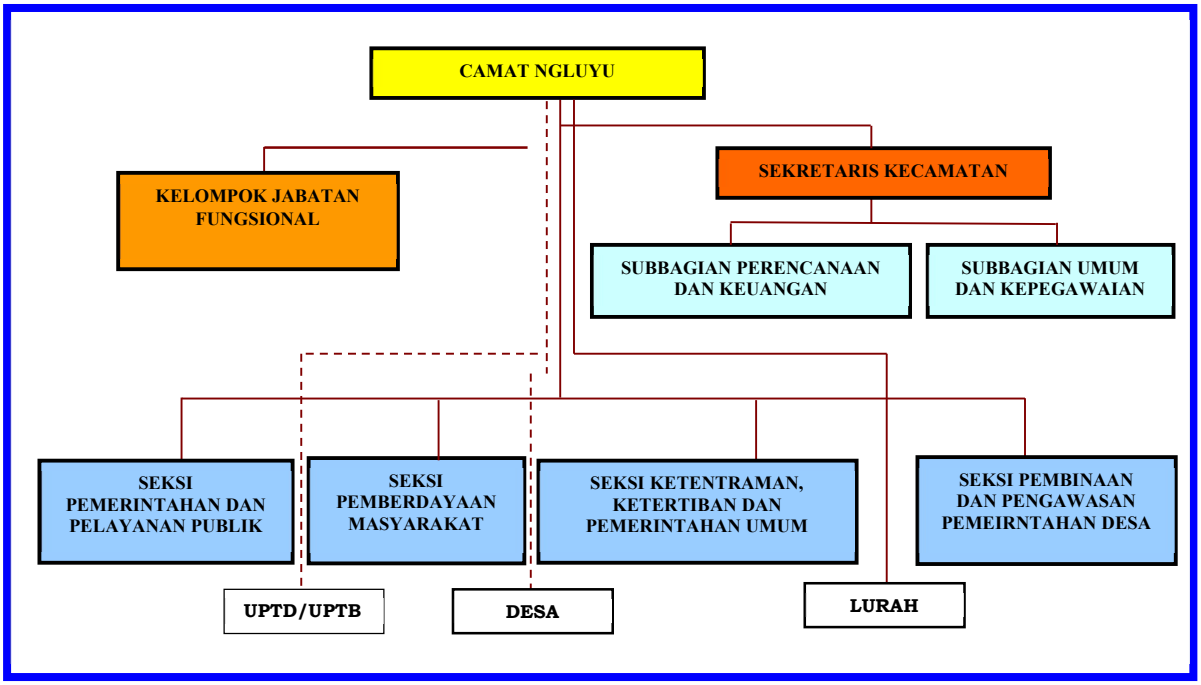
a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
e) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Ngluyu adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk dari Kecamatan Ngluyu.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
   i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
   j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengordinasin pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Ngluyu adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngluyu sebanyak 8 (Delapan), dan belum terisi 2 (Dua) oleh pejabat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Pada Kecamatan Ngluyu
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngluyu sebanyak 6 (Enam)

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	0
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1
7.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pem Desa	0
Jumlah		**6**

c. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Ngluyu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngluyu
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	2
4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tk.I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	1
7.	Pengatur Muda Tk.I	II/a	0
8.	Golongan Penuh Waktu	V	1
9	Golongan Paruh Waktu	V	3
Jumlah			**14**

1.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate*

Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

   Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngluyu guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5) Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

   Masih tingginya angka kriminalitas dan masih rendahnya keterlibatan semua pihak baik masyarakat, polisi, dan kecamatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan menjadi faktor penting untuk menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Teknik Menyimpulan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAGNA PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU DTRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatnya Kinerja Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan yang aspiratif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Ketahanan terhadap peubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik Kesenjangan, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasikan dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosokan ekonomi global	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, pengembangan insfrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan, pengelolaan Lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta Penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Insfrastruktur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. • Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. • Pelayanan Prima. • Peningkatan Sinergitas Kecamatan. • Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;
1.2. Maksud dan Tujuan;
1.3. Landasan Hukum;
1.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
1.5. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued);
1.6. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan
2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi;

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;
3.2. Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang Berbatasn);
3.5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 merupakan periode krusial di mana terdapat irisan antara dokumen transisi RPD 2024–2026 dan dokumen jangka menengah baru RPJMD 2025–2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 diposisikan sebagai "Jembatan Kinerja" yang memastikan keberlanjutan layanan publik sekaligus menjadi titik nol (*baseline*) bagi visi misi Kepala Daerah terpilih.

1. Penyelarasan IKU Transisi Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, IKU 2025 tidak berdiri sendiri. Terdapat dua narasi penyesuaian untuk mengakomodasi perbedaan target antara dokumen RPD dan RPJMD:

- Narasi Kinerja Operasional (Berbasis RPD): Menitikberatkan pada pemenuhan target antara untuk menjaga stabilitas makro daerah pasca-pandemi dan penyelesaian mandat transisi.
- Narasi Kinerja Strategis (Berbasis RPJMD): Menitikberatkan pada penyesuaian target baru yang lebih progresif atau perubahan indikator untuk mendukung transformasi ekonomi dan digital yang menjadi fokus Bupati terpilih.

2. Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPD 2024–2026

Dokumen RPD 2024–2026 berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan arah pembangunan. Pada tahun 2025, perencanaan kinerja difokuskan pada:

A. Sasaran Antara (*Intermediate Outcome*) Sasaran antara tahun 2025 difokuskan pada pemantapan kualitas birokrasi dan pemulihan daya beli masyarakat. Target kinerja diarahkan untuk memastikan efektivitas belanja modal agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

B. Indikator Kesinambungan Kinerja Beberapa indikator kunci yang terus dipertahankan kesinambungannya antara lain:

- Indeks SAKIP: Menjaga ritme akuntabilitas agar tetap pada predikat "BB".
- Opini BPK: Mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai standar dasar tata kelola keuangan.
- Prevalensi Stunting: Melanjutkan intervensi spesifik dan sensitif secara konsisten dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Ngluyu sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD 2024-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Ngluyu Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 3 tahun (RPD 2024 - 2026) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngluyu adalah : "Meningkatkan Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel"

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, yang diukur dengan indicator dengan Indikator Kinerja yaitu berupa Indeks Sinergitas Penyelnggaraan Pemerintahan Kecamatan.

b. Misi

Misi didalam RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Renstra Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk adalah Sasaran 2 (dua) yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
   Indikator : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
   Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Ngluyu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	78,5

2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	25%

Sumber : RPD 2024-2026.

3. Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025–2029

Memasuki tahun pertama RPJMD, perencanaan kinerja tahun 2025 diperlakukan sebagai tahapan awal dan arah kebijakan, bukan sebagai target puncak.

A. Sasaran Strategis Awal RPJMD Sasaran strategis awal diletakkan pada "Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur Ekonomi". Fokusnya adalah penguatan sistem digital pemerintahan (SPBE) dan optimalisasi Kawasan Industri Nganjuk (KING) sebagai penarik investasi masa depan.

B. Indikator Fondasi (*Baseline & Early Achievement*) Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kekuatan awal (*starting point*) bagi kepemimpinan lima tahun ke depan:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Dijadikan *baseline* untuk melihat sejauh mana responsivitas layanan publik di awal periode.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Menjadi angka fondasi untuk mengevaluasi efektivitas kemudahan investasi dan pelatihan kerja ke depan.
- Digitalisasi Desa: Menilai persentase desa yang sudah siap secara administrasi digital sebagai fondasi *Smart Village*.

Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Ngluyu Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD 2025-2029) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngluyu adalah : "Meningkatkan Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel”

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, yang diukur dengan indicator dengan Indikator Kinerja yaitu berupa Indeks Sinergitas Penyelnggaraan Pemerintahan Kecamatan.

b. Misi

Misi didalam RPJMD 2025-2029 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Renstra Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk adalah Sasaran 3 (tiga) yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
   Indikator : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
   Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
   Indikator : Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.2

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluyu 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	78,5
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	25%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	81 %

Sumber : RPJMD 2025-2029

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngluyu merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen Renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target Tahun 2025.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluyu Tahun 2025 disusun berdasar RPD 2024-2026 berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluyu

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	78,5
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	25 %

Sumber : RPD 2024-2026.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluyu Tahun 2025 disusun berdasar RPJMD 2025-2029 berdasar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan;
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa.

Tabel 2.2

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngluyu 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	78,5
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	25 %
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	81 %

Sumber : RPJMD 2025-2029

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngluyu merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Ngluyu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ngluyu Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja *(performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Ngluyu menetapkan kriteria ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan interval nilai capaian sebagai berikut :

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≥ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

Capaian kinerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	78,5	87,06	110,90%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Re nstra 2024-2026	25%	30%	120 %
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	78	87,08	111,64 %
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	81 %	100%	123,46 %

Berdasarkan data pada Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja organisasi tersebut. Analisis ini membagi evaluasi menjadi dua perspektif perencanaan, yaitu berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 *(Baseline).*

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

Pada segmen ini, kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, meskipun belum ada yang mencapai 100%.

- **Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN):**

Indikator sasaran mencapai angka 110,90 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah sangat baik dan ideal. yang menandakan manajemen operasional di kecamatan sudah berjalan sesuai rill. Berikut unsur penilaian ESukma Jatim:

1. Persyaratan (83,33)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (86,11)
3. Waktu Penyelesaian (84,2)
4. Biaya / Tarif (100)
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (82,47)
6. Kompetensi Pelaksanaan (82,47)
7. Perilaku Pelaksana (91,84)
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (91,15)
9. Sarana dan Prasaran (81,94)

- **Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.** Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan pada tahun 2025. Setelah pada tahun 2024 realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 33%, pada tahun 2025 angka tersebut menjadi 30 % dari target 25%.

  Berikut Kejadian Tahun lalu (2024) sejumlah 10 (sepuluh) kejadian:

  1. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian,
  2. Pembunuhan sejumlah 1 kejadian,
  3. Tanah Longsor sejumlah 3 kejadian,
  4. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian

  Sedangkan kejadian di Bulan Januari - Desember Tahun (2025) sejumlah 7 (tujuh) kejadian:

  1. Kebakaran rumah di Ds. Lengkonglor,
  2. Gantung Diri di Ds. Gampeng,
  3. Pohon Tumbang di Dsn. Puncu Ds. Gampeng,
  4. Bangunan Ibadah / Masjid Roboh Tertimpa Pohon Tumbang Ds. Gampeng,
  5. Kerusakan Rumah / Bangunan akibat Angin Putting Beliung di Ds. Ngluyu,
  6. Pohon Tumbang di Daerah Watu Gandul Ruas Jalan Gondng Ngluyu,
  7. Kebakaran Kandang Ternak di Ds. Ngluyu.

  Dengan rumusan analisis capaian sasaran sebagai berikut:

  Jumlah Kasus tahun lalu – Jumlah Kasus tahun ini
  ----------x 100 %
  Jumlah Kasus tahun lalu

$$= \frac{10 - 7}{10} \times 100\ \%$$

$$= 30\ \%$$

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

Penilaian berdasarkan baseline RPJMD menunjukkan hasil yang lebih fluktuatif karena berfungsi sebagai titik awal pengukuran jangka menengah yang baru. Pada segmen ini, kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi.

- **Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan :**

  Indikator Tujuan mencapai angka 111,64 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang. Capaian sebesar 111,64 % Realisasi melampaui target baseline, tim berhasil melakukan akselerasi kinerja di awal tahun periode RPJMD. Berikut Aspek penilaian Sinergitas :

  1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Bobot 10 dengan data kinerja 7,54
  2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 10 dengan data kinerja 9
  3. Pelaksanaan Tugas Delegatif 10 dengan data kinerja 9
  4. Penyelenggaraan Tugas Atributif 30 dengan data kinerja 20.96
  5. Inovasi/Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian 27 dengan data kinerja 21,6
  6. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan 8 dengan data kinerja 8
  7. Pelaksabaan Tugas Lainnya 5 dengan data kinerja 3,6.

- **Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN):**

  Indikator sasaran mencapai angka 110,90 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah sangat baik dan ideal. yang menandakan manajemen operasional di kecamatan sudah berjalan sesuai rill dan tim berhasil melakukan akselerasi kinerja di awal tahun periode RPJMD. Berikut unsur penilaian E-Sukma Jatim:

  1. Persyaratan 84,56
  2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 84,36
  3. Waktu Penyelesaian 82,11
  4. Biaya / Tarif 97,39
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 83,23
  6. Kompetensi Pelaksanaan 84,85
  7. Perilaku Pelaksana 86,71
  8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 97,46
  9. Sarana dan Prasarana 82,72

- **Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.** Indikator sasaran penurunan pelanggaran mencapai 120%. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan pada tahun 2025. Setelah pada tahun 2024 realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 33%, pada tahun 2025 angka menjadi 30 %. (realisasi 30% dari target 25%).

  Berikut Kejadian Tahun lalu (2024) sejumlah 10 (sepuluh) kejadian:

  1. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian,
  2. Pembunuhan sejumlah 1 kejadian,
  3. Tanah Longsor sejumlah 3 kejadian,
  4. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian

  Sedangkan kejadian di Bulan Januari - Desember Tahun (2025) sejumlah 7 (tujuh) kejadian:

  1. Kebakaran rumah di Ds. Lengkonglor,
  2. Gantung Diri di Ds. Gampeng,
  3. Pohon Tumbang di Dsn. Puncu Ds. Gampeng,
  4. Bangunan Ibadah / Masjid Roboh Tertimpa Pohon Tumbang Ds. Gampeng,
  5. Kerusakan Rumah / Bangunan akibat Angin Putting Beliung di Ds. Ngluyu,
  6. Pohon Tumbang di Daerah Watu Gandul Ruas Jalan Gondng Ngluyu,
  7. Kebakaran Kandang Ternak di Ds. Ngluyu.

  Dengan rumusan analisis capaian sasaran sebagai berikut:

  Jumlah Kasus tahun lalu – Jumlah Kasus tahun ini
  ----------x 100 %
  Jumlah Kasus tahun lalu

  10 -7
= -------- X 100 %
  10
= 30 %

- **Meningkatnya Tertib Administrasi Desa** Indikator sasaran Presentase Desa Tertib Administrasi Desa mencapai target sempurna 123,46 %. Ini menunjukkan pembinaan terhadap desa telah mencapai standar yang ditetapkan secara konsisten, capaian ini berjalan sudah sangat stabil dan mencapai target ideal di kategori RPJMD. Metode pengumpulan data dengan memberikan format pengisian laporan administrasi desa kepada Desa yang nantinya diupload di *google drive* Kecamatan. Adapun jenis-jenis buku administrasi Desa :

I. Buku Administrasi Umum

1. Buku Peraturan di Desa
2. Buku Keputusan Kepala Desa
3. Buku Inventarisasi dan Kekayaan Desa
4. Buku Aparat Pemerintahan Desa
5. Buku Tanah Kas Desa
6. Buku Tanah di Desa
7. Buku Agenda
8. Buku Ekspedisi
9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa

II. Buku Administrasi Penduduk

1. Buku Induk Penduduk
2. Buku Mutasi Penduduk Desa
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
4. Buku Penduduk Sementara
5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga

III. Buku Administrasi Keuangan

1. Buku APB Desa
2. Buku Rencana Anggaran Biaya
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan
4. Buku Kas Umum
5. Buku Kas Pembantu
6. Buku Bank Desa

IV. Buku Administrasi Pembangunan

1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
2. Buku Kegiatan Pembangunan
3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan
4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

V. Buku Administrasi Lainnya

1. Kegiatan BPD dalam buku administrasi BPD
2. Kegiatan Musyawarakt Desa dalam buku Musyawarah Desa
3. Kegiatan Lembaga Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Dengan rumusan analisis capaian sasaran Presentase Desa Tertib Administrasi Desa berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\ \%$$

$$= 100\%$$

Dimana semua desa di Kecamatan Ngluyu sudah melaksanakan Tertib Administrasi Desa.

A.2. Perbandingan Realisasi Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun (2024, 2023)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan (RPD/RPJMD	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	82	82	83	78,5	82,40	83,48	85,53	87,06
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	N/A	N/A	10 %	25%	N/A	N/A	33%	30%
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	N/A	78,06	N/A	N/A	N/A	87,08
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	82	82	83	78,5	82,40	83,48	85,53	87,06

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	10 %	25%	N/A	N/A	33%	30%
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	N/A	81%	N/A	N/A	N/A	100%

Sumber : LKJIP 2022, LKJIP 2023, LKJIP 2024 dan Renstra 2025-2029.

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran dengan target akhir Renstra penting untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah strategis yang telah diambil dan berhasil dalam mencapai visi dan misi organisasi. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang berikutnya dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2022 hingga 2025, sasaran untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menunjukkan tren perkembangan yang positif dan signifikan. Hal ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencerminkan persepsi publik terhadap efektivitas, kecepatan, dan transparansi layanan di tingkat Kecamatan.

Analisis Capaian Tahunan: Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, realisasi IKM menunjukkan pertumbuhan stabil di angka 82,40, 83,48, 85,53 dan 87,06. tingkat capaian kinerja tercapai, menunjukkan upaya maksimal dalam optimalisasi standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Puncak keberhasilan kinerja tercapai pada tahun 2025, di mana realisasi sebesar 87,06 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 78,5 (capaian mencapai 110,90%).

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2022 dan 2023 tidak menampilkan indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Terkait sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, instansi menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka pelanggaran di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2024, realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 33%. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut Kejadian Tahun lalu (2024):

1. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian,
2. Pembunuhan sejumlah 1 kejadian,
3. Tanah Longsor sejumlah 3 kejadian,
4. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian

Secara angka persentase memenuhi target 10% telah terpenuhi yaitu 33 %, namun angka ini menjadi fondasi penting dalam pemetaan wilayah rawan konflik 2024, Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pelanggaran mencapai angka maksimal yang diharapkan. Secara administratif, realisasi ini bisa disebabkan oleh intensitas pengawasan yang meningkat sehingga lebih banyak pelanggaran yang terdeteksi dan tercatat.

Pada tahun 2025, target ditetapkan pada angka 15 % (mengalami perubahan satuan/nomenklatur) dengan realisasi sebesar 30 %. Capaian ini mencapai 120 %, yang artinya kinerja di lapangan melampaui ekspektasi perencanaan secara signifikan. Memasuki tahun 2025, terjadi peningkatan efektivitas penanganan trantibum yang sangat signifikan. Dengan target kinerja sebesar 15 %, instansi mampu merealisasikan angka 30% atau setara dengan 120% dari target yang ditetapkan. Lonjakan capaian ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antara aparat kecamatan dengan unsur pengamanan kewilayahan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut Kejadian Tahun lalu (2025):

Sedangkan kejadian di Tahun Sekarang (2025) :

1. Kebakaran rumah di Ds. Lengkonglor,
2. Gantung Diri di Ds. Gampeng,
3. Pohon Tumbang di Dsn. Puncu Ds. Gampeng,
4. Bangunan Ibadah / Masjid Roboh Tertimpa Pohon Tumbang Ds. Gampeng,
5. Kerusakan Rumah / Bangunan akibat Angin Putting Beliung di Ds. Ngluyu,
6. Pohon Tumbang di Daerah Watu Gandul Ruas Jalan Gondng Ngluyu,
7. Kebakaran Kandang Ternak di Ds. Ngluyu.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Capaian Indeks Sinergitas Kecamatan pada periode 2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Realisasi di lapangan mengalami dinamika yang kontras antara keberhasilan tinggi.

Analisis Fluktuasi:

- 2025: Instansi berhasil melakukan pemulihan kinerja secara luar biasa di tahun 2025 dengan realisasi 87,08, melampaui target yang ditetapkan yaitu78. Ini menunjukkan adanya evaluasi efektif atas kegagalan di tahun sebelumnya.

Meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target) sinergitas masih bisa ditingkatkan lagi. Disarankan untuk menstandarisasi pola koordinasi agar di tahun-tahun mendatang kinerjanya lebih stabil (konsisten) dan tidak fluktuatif.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2022 hingga 2025, sasaran untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan menunjukkan tren perkembangan yang positif dan signifikan. Hal ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan yang mencerminkan persepsi publik terhadap efektivitas, kecepatan, dan transparansi layanan di tingkat Kecamatan.

Analisis Capaian Tahunan: Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, realisasi IKM menunjukkan pertumbuhan stabil di angka 82,40, 83,48, 85,53 dan 87,06. tingkat capaian kinerja tercapai, menunjukkan upaya maksimal dalam optimalisasi standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Puncak keberhasilan kinerja tercapai pada tahun 2025, di mana realisasi sebesar 87,06 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 78,5 (capaian mencapai 110,90%).

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2022 dan 2023 tidak menampilkan indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Terkait sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, instansi menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka pelanggaran di wilayah Kecamatan. Terjadi perubahan drastis pada penetapan target dari tahun 2024 ke 2025. Pada tahun 2024, target menggunakan satuan persentase (10%), sedangkan pada tahun 2025 menggunakan satuan persentase (30%). Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian metodologi pengukuran kinerja agar lebih realistis dan terukur sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut Kejadian Tahun lalu (2024):

1. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian,
2. Pembunuhan sejumlah 1 kejadian,
3. Tanah Longsor sejumlah 3 kejadian,
4. Laka Lantas sejumlah 4 kejadian.

Realisasi tahun 2025 sebesar 30 % terhadap target 15% menghasilkan capaian kinerja sebesar 120 %. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan pada tahun 2025. Setelah pada tahun 2024 realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 33%, pada tahun 2025 angka tersebut menjadi 30 %. Sedangkan kejadian di Tahun Sekarang (2025) :

1. Kebakaran rumah di Ds. Lengkonglor,
2. Gantung Diri di Ds. Gampeng,
3. Pohon Tumbang di Dsn. Puncu Ds. Gampeng,
4. Bangunan Ibadah / Masjid Roboh Tertimpa Pohon Tumbang Ds. Gampeng,
5. Kerusakan Rumah / Bangunan akibat Angin Putting Beliung di Ds. Ngluyu,
6. Pohon Tumbang di Daerah Watu Gandul Ruas Jalan Gondng Ngluyu,
7. Kebakaran Kandang Ternak di Ds. Ngluyu.

d. **Presentase Desa Tertib Administrasi Desa**

Salah satu sasaran strategis yang menjadi fokus pada tahun anggaran 2025 adalah "Meningkatnya Tertib Administrasi Desa". Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, berikut adalah rincian capaiannya: Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, target kinerja ditetapkan sebesar 81%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan antara realisasi terhadap target, maka persentase capaian kinerja mencapai 123,46 %, yang masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Berdasarkan data, ringkasan evaluasi capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa untuk tahun 2022 hingga 2024 berstatus N/A (dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada Renstra 2025-2029), analisis akan berfokus pada efektivitas pencapaian di tahun pertama periode perencanaan.

Meskipun target tahun 2025 telah tercapai secara maksimal (123,46%), kecamatan perlu menjaga konsistensi kualitas administrasi tersebut. Untuk tahun berikutnya, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap parameter "Tertib Administrasi" agar tidak hanya mencakup kelengkapan dokumen secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan validitas data di tingkat desa.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi.

3.1.3.1

Target Kinerja Renstra (berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Renstra Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	78,22	78,5	79	-	-	-
0Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	33	25	15	15	10	10
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	84	85	87	88	89
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	78,22	78,5	79	79,5	80	80,5
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	15	15	14	13	12

di Wilayah Kecamatan	dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan							
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	81	82	84	85	86

Sumber : Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Dasar Dokumen (RPD/ RPJMD)**	**Target Tahun Akhir Renstra**	**Realisasi Kinerja Tahun 2025**	**Tingkat Kemajuan (%)**
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	78,5	87,06	110,90%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	25%	30%	120%
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	78	87,08	111,64%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	78,5	87,06	110,90%

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	25%	30%	120%
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	81 %	100 %	123,46 %

Sumber : Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan data terbaru yang Anda sampaikan, terdapat penyesuaian pada Target Tahun Akhir Renstra menjadi 89. Hal ini mengubah status capaian yang sebelumnya melampaui target menjadi hampir mencapai target. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 tercatat sebesar 87.06. Capaian ini menunjukkan konsistensi instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Selisih capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi strategis, terutama dalam mengidentifikasi unsur pelayanan mana yang masih memerlukan akselerasi guna mencapai angka ideal pada periode mendatang.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebesar 87,06. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030 sebesar dengan tingkat kemajuan sebesar 81 yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\,\% = \frac{87{,}06}{81} \times 100\,\% = 107{,}48\,\%$$

Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 96,73% , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Ngluyu telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ngluyu melakukan peningkatan pelayanan Ceria (Cepat, Efesien dan Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E-Sukma dengan hasil baik. Kedepan

Kecamatan Ngluyu akan menaikkan target pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Ngluyu semakin baik.

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Target akhir Renstra ditetapkan pada angka 10 %, sementara realisasi yang dicapai adalah 30%. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan efektif dan mendekati target yang direncanakan. Tingkat kemajuan sebesar 120 % dikategorikan sebagai capaian yang Tinggi/Sangat Baik.

Hasil ini menggambarkan keberhasilan langkah-langkah preventif dan penegakan peraturan di lapangan. Meskipun mencapai angka 100%, capaian ini merupakan indikator bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir secara berkelanjutan. Selisih capaian yang ada akan menjadi fokus perbaikan pada periode selanjutnya melalui penguatan deteksi dini dan perluasan kolaborasi dengan unsur pengamanan kewilayahan lainnya.

Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 30 % dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 10% maka tingkat kemajuannya sebesar

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{30}{10} \times 100\ \% = 300\ \%$$

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Sinergitas Kecamatan

Berdasarkan data terbaru untuk sasaran Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, indikator ini menunjukkan performa yang Sangat Memuaskan (melampaui target). Realisasi sebesar 87,06 terhadap target 78 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 111,64 %. Mengingat tahun 2025 adalah tahun awal (baseline) bagi dokumen Renstra 2025-2029, pencapaian ini menunjukkan bahwa pondasi koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan sudah berada di atas standar yang ditetapkan sejak awal periode. Realiasasi Indeks Sinergitas Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 111,64 % maka tingkat kemajuannya sebesar

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{87,06}{90} \times 100\ \% = 96,73\ \%$$

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Berdasarkan data terbaru untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, indikator ini menunjukkan pencapaian yang sangat presisi terhadap target *baseline* yang ditetapkan. Realisasi sebesar 87,06 terhadap target 78,5 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 110,90%. Karena data ini merupakan *baseline* (tahun awal) dari perencanaan jangka menengah yang baru, pencapaian 100% ini menjadi titik awal yang sangat aman. Instansi telah membuktikan kapasitasnya dalam menjaga kualitas layanan pada level tinggi, sehingga fokus pada tahun-tahun berikutnya adalah mempertahankan konsistensi skor tersebut agar tidak mengalami penurunan (stagnasi). Sebagai tahun awal dalam implementasi Renstra 2025-2029, capaian ini menegaskan komitmen Kecamatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif. Keberhasilan mencapai target *baseline* ini menjadi pondasi penting bagi penguatan kepercayaan publik dan efektivitas birokrasi di tingkat kecamatan untuk tahun-tahun mendatang. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 87,06. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030 sebesar 81 dengan tingkat kemajuan sebesar107,48% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\,\% = \frac{87{,}06}{81} \times 100\,\% = 107{,}48\%$$

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi sebesar 30% terhadap target 25% menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 120%. Dalam sistem akuntabilitas kinerja, angka ini menunjukkan performa yang sangat progresif. Instansi berhasil menekan angka pelanggaran trantibum dua kali lipat lebih banyak daripada yang diproyeksikan dalam target *baseline* awal. Tingkat kemajuan 120% ini mengindikasikan bahwa strategi keamanan yang diterapkan di wilayah Kecamatan bekerja dengan sangat efektif. Hal ini biasanya didorong oleh:

- Peningkatan frekuensi patroli gabungan.
- Keberhasilan program deteksi dini gangguan ketertiban.
- Edukasi masyarakat yang berhasil menurunkan niat pelanggaran secara drastic

Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 120 % maka tingkat kemajuannya sebesar

Realisasi Kinerja Tahun 2025 30

---------- x 100 % = -------- X 100 % = 300%

Target pada akhir Renstra 10

d. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Berdasarkan data tersebut untuk sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa, indikator ini menunjukkan pencapaian yang sangat solid dan akurat pada tahun pertama implementasi Renstra 2025-2029. Adapun target kinerja ditetapkan sebesar 81% dengan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100% menunjukkan bahwa program pembinaan administrasi desa oleh Kecamatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa yang meliputi kelengkapan sebagai berikut : Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Penduduk, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, Buku Administrasi Lainnya. Sesuai dengan analisis di awal, pencapaian 100% ini menandakan bahwa mayoritas desa sudah berada pada status tertib administrasi. Realiasasi Meningkatnya Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 100 % maka tingkat kemajuannya sebesar

Realisasi Kinerja Tahun 2025 100

---------- x 100 % = -------- X 100 % = 113,64 %

Target pada akhir Renstra 88

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan RPD 2024-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Standart Jatim	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89.23	87,06	Dibawah standard
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	30%	-

Sumber Data : Aplikasi Sukma e- Jatim *https://sukma.jatimprov.go.id/fe*

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Standart Jatim	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	-	87,08	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	89.23	87,06	Dibawah
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	30%	
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	-	100%	

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

   a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan RPD 2024-2026. Dengan Realisasi Tingkat Nasional/Provinsi dapat disimpulkan bahwa :

Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2025 adalah 87,06 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89.23 Kecamatan Ngluyu masih dibawah standart Nasional/Provinsi. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik masih belum optimal. Kedepannya Kecamatan Ngluyu akan menaikkan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Ngluyu mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.

   b. **Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**

Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 30% jika dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

2. **Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)**

   a. **Indeks Sinergitas Kecamatan**

Realisasi kinerja Tujuan strategis yang kedua Indeks Sinergitas Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 106% jika dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

   b. **Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan**

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029. Dengan Realisasi Tingkat Nasional/Provinsi dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 adalah 87,06 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89.23 Kecamatan Ngluyu masih dibawah standart Nasional/Provinsi. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik masih belum optimal. Kedepannya Kecamatan Ngluyu akan menaikkan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Ngluyu mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 30% dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

d. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dari tahun 2025 sebesar 123,46 % dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhaslan/Kegagalan Capaian Kinerja

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Dok Perenc.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Pendukung atau Penghambat	Alternati Solusi
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	78,5	87,06	110,90%	Faktor Pendukung dipengaruhi oleh: • Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket. • Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon. • Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.	Analisis keberhasilan : • Durasi Rata-rata dalam penyelesaian satu Dokumen sesuai atau lebih cepat dari SOP yang ditetapkan.

						• Sistem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa suaranya didengar.	
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	25%	30%	120%	Faktor Pendukung dipengaruhi oleh: • Kecamatan tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan sangat bergantung pada solidnya hubungan antara: 1. **Koordinasi Tiga Pilar:** Hubungan harmonis dan rutin antara **Camat,** 2. **Kapolsek, dan Danramil**. Pertemuan rutin (coffee morning) untuk memetakan kerawanan wilayah adalah kunci.	Analisis keberhasilan : - Solidnya hubungan antara Camat, Kapolsek, dan Danramil. - Adanya dana desa atau dana kelurahan yang bisa dialokasikan untuk penguatan Linmas dan CCTV lingkungan.

						• Faktor Partisipasi Masyarakat (Sistem Deteksi Dini) 1. Revitalisasi Siskamling/Poskamling: Aktifnya ronda malam yang berbasis gotong royong. 2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM): Adanya jaringan informan dari tokoh masyarakat/pemuda yang memberikan informasi cepat sebelum konflik membesar. 3. Pemanfaatan Grup WhatsApp: Komunikasi cepat antara Ketua RT/RW dengan pihak Kecamatan/Kelurahan untuk melaporkan gangguan ketertiban secara *real-time*.	

Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	78	87,08	111,64%	Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja : a. Faktor Internal: Pergantian personel kunci yang mempengaruhi pola komunikasi atau sinergitas tim di tingkat Kecamatan. b. Faktor Eksternal: Adanya agenda besar (seperti Pemilu atau kegiatan nasional) di tahun 2024 yang mungkin menguras energi koordinasi sehingga skor sinergitas rutin menurun.	Analisis keberhasilan : • Program kerja Kecamatan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan didukung oleh program kerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	78,5	87,06	110,90%	Faktor Pendukung dipengaruhi oleh: • Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket. • Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya	Analisis keberhasilan : • Durasi Rata-rata dalam penyelesaian satu Dokumen sesuai atau lebih cepat dari SOP yang ditetapkan.

						fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon. • Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.istem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa suaranya didengar.	
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di	Renstra 2025-2029 (Baseline)	25%	30%	120%	Faktor Pendukung dipengaruhi oleh: • Kecamatan tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan sangat bergantung pada solidnya hubungan antara:	Analisis keberhasilan : - Solidnya hubungan antara Camat, Kapolsek, dan Danramil. - Adanya dana desa atau dana kelurahan yang bisa dialokasikan untuk

	wilayah Kecamatan					a. Koordinasi Tiga Pilar: Hubungan harmonis dan rutin antara Camat, b. Kapolsek, dan Danramil. Pertemuan rutin (coffee morning) untuk memetakan kerawanan wilayah adalah kunci. • Faktor Partisipasi Masyarakat (Sistem Deteksi Dini) a. Revitalisasi Siskamling/Poskamling: Aktifnya ronda malam yang berbasis gotong royong. b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM): Adanya jaringan informan dari tokoh masyarakat/pemuda yang memberikan informasi cepat sebelum konflik membesar. c. Pemanfaatan Grup WhatsApp: Komunikasi cepat antara Ketua RT/RW dengan pihak Kecamatan/Kelurahan untuk melaporkan gangguan ketertiban secara *real-time*.	penguatan Linmas dan CCTV lingkungan.

Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	81%	100%	123,56%	Target Persentase Desa Tertib Administrasi di tahun 2025 mengonfirmasi bahwa organisasi telah **berhasil** menjembatani antara kewajiban administratif dalam RPD dengan visi inovatif dalam RPJMD - Penguatan Sistem Pengawasan Internal Desa (APIP) - Efektivitas Platform Digital Administrasi (Kelanjutan RPD) - Program Pendampingan Terpadu (Fondasi RPJMD)	Keberhasilan mencapai 125% pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa desa telah memenuhi empat pilar utama administrasi sesuai regulasi (Permendagri No. 47 Tahun 2016): - **Administrasi Umum:** Pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada Buku Peraturan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, dan Buku Inventaris Kekayaan Desa. - **Administrasi Penduduk:** Penyelenggaraan buku induk penduduk, buku

							mutasi, dan buku rekapitulasi penduduk yang akurat dan *real-time*. - **Administrasi Keuangan:** Penatausahaan keuangan yang mencakup buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank yang akuntabel. - **Administrasi Pembangunan:** Pendokumentasian rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) dan hasil-hasil pembangunan secara transparan.

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat disimpulkan bahwa :

Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Ngluyu pada tahun 2025 sebesar 110,90% dari target Renstra 2024-2026 sebesar 78,5% maka dikatakan tercapai. Adapaun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan

- Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket.
- Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon.
- Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.
- Sistem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa suaranya didengar.

Motto Pelayanan Kecamatan Ngluyu “CERIA”

a. Cepat
b. Efesien dan Efektif
c. Ramah
d. Iklhas
e. Akuntabel

b. **Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.**

Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 terealisasi dari target Renstra 2024-2026 sebesar 30% dari target 25%. maka dapat dikatakan bahwa target tercapai. Adapun penyebab ketercapaian hal tersebut dikarenakan

- Solidnya hubungan antara Camat, Kapolsek, dan Danramil.
- Adanya dana desa atau dana kelurahan yang bisa dialokasikan untuk penguatan Linmas dan CCTV lingkungan.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Sinergitas Kecamatan

Realisasi kinerja Tujuan strategis yang kedua Indeks Sinergitas Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 111,64% Adapun penyebab ketercapaian hal tersebut dikarenakan tercapainya Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja :

- Faktor Internal: Pergantian personel kunci yang mempengaruhi pola komunikasi atau sinergitas tim di tingkat Kecamatan.
- Faktor Eksternal: Adanya agenda besar (seperti Pemilu atau kegiatan nasional) di tahun 2025 yang mungkin menguras energi koordinasi sehingga skor sinergitas rutin menurun.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Ngluyu pada tahun 2025 adalah 87,06 yaitu diperoleh 110,90% dari target Renstra 2025-2029 sebesar 78,5 maka dikatakan tercapai. Adapaun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan

- Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket.
- Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon.
- Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.
- Sistem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa suaranya didengar.

Motto Pelayanan Kecamatan Ngluyu “CERIA”

a. Cepat
b. Efesien dan Efektif
c. Ramah
d. Iklhas
e. Akuntabel

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 terealisasi dari target Renstra 2025-2029 sebesar 30% dari target 25% maka dapat dikatakan bahwa target tercapai. Adapun penyebab ketercapaian hal tersebut dikarenakan

- Solidnya hubungan antara Camat, Kapolsek, dan Danramil.
- Adanya dana desa atau dana kelurahan yang bisa dialokasikan untuk penguatan Linmas dan CCTV lingkungan.

d. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Sasaran yang ketiga Analisis mengenai Meningkatnya Tertib Administrasi Desa merupakan tinjauan strategis terhadap bagaimana pemerintah desa mengelola dokumen, data, dan kebijakan secara sistematis. Berdasarkan data menunjukkan realisasi 100% dari target 81% pada tahun 2025, berikut adalah analisis mendalamnya. Keberhasilan mencapai 120% pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa desa telah memenuhi empat pilar utama administrasi sesuai regulasi (Permendagri No. 47 Tahun 2016):

- Administrasi Umum: Pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada Buku Peraturan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, dan Buku Inventaris Kekayaan Desa.
- Administrasi Penduduk: Penyelenggaraan buku induk penduduk, buku mutasi, dan buku rekapitulasi penduduk yang akurat dan *real-time*.
- Administrasi Keuangan: Penatausahaan keuangan yang mencakup buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank yang akuntabel.
- Administrasi Pembangunan: Pendokumentasian rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) dan hasil-hasil pembangunan secara transparan.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik Kecamatan Ngluyu didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. Kecamatan Ngluyu dalam melaksanakan seluruh Kecamatan Ngluyu pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) program.

Tabel 3.1.6

Penggunaan Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dok Perenc.	(%) Capaian Kinerja	(%) Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	3	4	5
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	110,90%	73,01 %	37,89%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	120%	44,53%	75,47%
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	111,64%	71,32%	40,32%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	110,90%	43,03%	66,97%

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	120%	44,53%	75,47%
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	123,46%	53,44%	46,56%

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

Efisiensi = Capaian Kinerja (%) - Persentase Penyerapan Anggaran (%)

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Dari Sasaran ke satu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 110,90% dan realisasi anggaran dari empat Program yang mendukung yaitu

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Rata rata dari tiga Program tersebut sebesar sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 110,90 % – 73,01 % = 37,89%. Hal ini menandakan bahwa dengan serapan anggaran yang belum mencapai 90%, target kinerja mencapai 100%.

- **Penyebab:** Adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Ngluyu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Ngluyu tetap melaksanakan Pelayanan publik secara maksimal. Sehingga Masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi;
b. Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum, Kasi Binwas dan Staf Pelaksana.

b. **Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.**

Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 120 % sedangdan realisasi anggaran yang mendukung

a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

dari progran tersebut sebesar 44,53% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 120 % - 44,53%= 75,47%. menunjukkan adanya kurangnya komitmen dari Kecamatan Ngluyu, dalam melaksakan kinerja.

- Penyebab: Anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin (operasional/gaji/BBM patroli) yang sifatnya konsumtif, namun tidak menyentuh akar masalah (tindakan preventif). Ini menjadi catatan penting untuk RPJMD 2025-2029.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Dari Sasaran ke satu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 110,90% dan realisasi anggaran dari empat Program yang mendukung yaitu sebesar 73,01 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 110,90 % – 73,01 % = 37,89%. Hal ini menandakan bahwa dengan serapan anggaran yang belum mencapai 90%, target kinerja hampir mencapai 100%.

- **Penyebab:** Adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Ngluyu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Ngluyu tetap melaksanakan Pelayanan public secara maksimal. Sehingga Masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi;

Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum, Kasi Binwas dan Staf Pelaksana.

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 120 % sedangdan realisasi anggaran yang mendukung

a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar
b. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

dari realisasi 2 progran tersebut sebesar 120 % dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 120 % - 44,53%= 75,47%. menunjukkan adanya kurangnya komitmen dari Kecamatan Ngluyu, dalam melaksakan kinerja.

- Penyebab: Anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin (operasional/honor/koordinasi/konsultasi/BBM patroli) yang sifatnya konsumtif, namun tidak menyentuh akar masalah (tindakan preventif). Ini menjadi catatan penting untuk RPJMD 2025-2029.

c. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Untuk sasaran yang ketiga, Meningkatnya Tertib Administrasi Desa capaian kinerjanya sebesar 100 % sedangkan dan realisasi anggaran yang mendukung

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100 %. Rata rata dari realisasi 1 program tersebut sebesar 53,44% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 123,46 % - 3,44% = 46,56 % menunjukkan adanya Adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator sasaran yaitu pada Kecamatan Ngluyu sebagaimana table di bawah :

A.7 Analisis Program/Kerja yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7 (1)

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan. (RPD 2024-2026)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perenc.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Renstra 2024-2026	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Kecamatan Ngluyu**	**78**	**84,92**	**85%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**91 %**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	91 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**82%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12 Orang/ Bulan	11 Orang/Bulan	83%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	96%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	45%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	1 Dokumen	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang	0%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***5 Dokumen***	**5 Dokumen**	**83%**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	73%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	84%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen	100%

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6 Laporan	96%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	***63%***
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	***13 Dokumen***	***13 Dokumen***	**98%**
			Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	75 Unit	97%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	99%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**3 Laporan**	**85%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	96%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3 Laporan	84%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	***22 Laporan***	**22 Laporan**	**96%**

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Laporan	5 Laporan	96%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	89%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	97%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**85%**	**85 %**	**74%**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***5*** ***Laporan***	**5** **Laporan**	**75%**

			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	75%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	***3 Laporan***	**3 Laporan**	**92%**
			Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	92%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	***1 Laporan***	**1 Laporan**	**32%**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	32%

Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN NGLUYU**	**85 %**	**85 %**	**94%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	***5*** ***Kegiatan***	**5** **Kegiatan**	**94%**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	96%
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3 Dokumen	92%

Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95**	**95,00**	**84%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	***6***	**6 Desa**	**84 %**
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	6,00	84 %
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	3,00	88%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**85 %**	**85 %**	**89 %**

			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 *Laporan***	**3 Laporan**	**89 %**
			Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	89 %
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**95 %**	**95 %**	**89%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**89 %**

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	89 %

Tabel 3.1.7 (2)
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan. (RPJMD 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perenc.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Renstra 2024-2026	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Kecamatan Ngluyu**	**78**	**84,92**	**85%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**91 %**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	91 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**82%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12 Orang/ Bulan	11 Orang/Bulan	83%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	96%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	45%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	1 Dokumen	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang	0%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***5 Dokumen***	**5 Dokumen**	**83%**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	73%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	84%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen	100%

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6 Laporan	96%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	***63%***
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	***13 Dokumen***	***13 Dokumen***	**98%**
			Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	75 Unit	97%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	99%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**3 Laporan**	**85%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	96%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3 Laporan	84%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	***22 Laporan***	**22 Laporan**	**96%**

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Laporan	5 Laporan	96%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	89%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	97%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**85%**	**85 %**	**74%**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***5*** ***Laporan***	**5** **Laporan**	**75%**

			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	75%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	***3 Laporan***	**3 Laporan**	**92%**
			Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	92%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	***1 Laporan***	**1 Laporan**	**32%**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	32%

Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN NGLUYU**	**85 %**	**85 %**	**94%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	***5*** ***Kegiatan***	**5** **Kegiatan**	**94%**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	96%
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3 Dokumen	92%

Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95**	**95,00**	**84%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	***6***	**6 Desa**	**84 %**
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	6,00	84 %
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	3,00	88%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**85 %**	**85 %**	**89 %**

			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 *Laporan***	**3 Laporan**	**89 %**
			Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	89 %
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**95 %**	**95 %**	**89%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**89 %**

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	89 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngluyu tahun anggaran 2025 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 78 dan terealisasi sebesar Nilai 84,92. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 85%. Terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2025. Formulasi perhitungan dari capaian tersebut ialah dari nilai SAKIP Kecamatan yang diperoleh dari tim penilai SAKIP yakni sebesar 67,75 (B). Berdasarkan catatan tim penilai SAKIP, salah satu upaya yang dapat diperbaiki antara lain; Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART, dimana salah satunya adalah "measurable" atau jelas dan dapat diukur. Target indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra adalah "Baik", tidak berupa angka sehingga sulit diukur.

Hal kompleks yang menjadi pendorong keberhasilan dari program ini ialah adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam program ini terdapat kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Pada tahun ini berhasil mencapai 5 dokumen dari target 5 dokumen. Hal ini disebabkan karena tercukupinya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat. Dokumen yang dimaksud antara lain; Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA); Rencana Kerja 2026 (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra 2025-2029).
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialahjumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah. Pada tahun ini berhasil mencapai 4 Dokumen dari taget 4 Dokumen (82%). Hal ini disebabkan karena ada efisiensi tercukupinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah antara lain; Dokumen Gaji dan Tunjangan; Laporan Keuangan dan Laporan Triwulan.
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan. Pada tahun ini mencapai 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Hal ini disebabkan karena adanya dokumen Kepegawaian yang meliputi Jumlah Pegawai Kecamatan yang naik pangkat, dan pensiun di kecamatan Ngluyu .

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah. Pada tahun ini mencapai 5 dokumen dari target 5 dokumen (83%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan tersedianya Dokumen Tata Naskah Dinas (Surat Dinas, Nota Dinas, SPT, SK, SE), Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Dokumen Kepegawaian, Dokumen Aset dan Perlengkapan dan Dokumen Kearsipan. Upaya tersebut dapat diperbaiki dengan meninjau kembali dan perbaiki prosedur operasional standar agar lebih sederhana, efektif, dan efisien.
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan. Pada tahun ini mencapai 13 unit dari target 13 unit (98%).
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun ini mencapai 3 laporan dari target 2 Laporan (85%).
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Formulai perhitungan kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara. Pada tahun ini mencapai 22 Unit dari target 22 Unit (96%). Terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (3) dan roda 4, pemeliharaan ac, Pemeliharaan Laptop, PC dan Pemeliharaan Gedung.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan target kinerja 85% terealisasi sebesar 85% dengan tingkat capaian sebesar 74%. Formulasi perhitungan dari program ini ialah persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana.

Upaya untuk terus mempertahankan capaian tersebut ialah mengimplementasikan dan terus perbarui sistem informasi terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara *real-time.*

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun ini kecamatan Ngluyu mencapai 5 laporan dari target sebesar 5 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 75%. Laporan tersebut berupa pelaksanaan intensifikasi PBB dan laporan pelaksanaan evaluasi pembayaran PBB. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor pendorong salah satunyaadalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatanpemerintahan sehingga program yang dijalankan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Upaya yang dilakukan

agar tetap dapat mempertahankan capaian kegiatan ini yakni dengan adanya regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman yang mengatur mekanisme koordinasi, sehingga setiap pihak mengetahui batasan dan tanggungjawabnya.

b. Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum mencapai 5 laporan dari target sebesar 5 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 75%.

c. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Pada tahun ini kecamatan Ngluyu mencapai 1 laporan dari target 1 laporan. Besar capaiannya yakni 32%. Laporan tersebut berupa laporan inovasi fasilitasi UMKM. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian pada kegiatan ini ialah memperkuat komunikasi antara camat dengan instansi ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya melalui forum koordinasi dan rapat rutin, serta menerapkan mekanisme komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi tersampaikan dengan cepat dan tepat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan target 85% dan terealisasi sebesar 85%, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 94% dengan formulasi perhitungan dari persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan Ngluyu.

Tingkat keberhasilan diperoleh dari pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan dan faktor penghambat ialah persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama. Upaya untuk meningkatkan capaian program ini ialah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi perangkat desa/kelurahan serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam bidang teknis maupun manajerial.

Dalam program ini hanya memuat satu kegiatan yakni koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tercapai 94%. Hal ini dikarenakan tercapainya jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan Ngluyu.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan target 85% dan terealisasi sebesar 85%. Formulasi perhitungan dari program ini adalah persentase permasalahan trantibum yang dikoordinasikan penanganannya dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas. Pada program ini juga terdapat satu kegiatan yakni koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025, capain kegiatan tersebut sebesar 2 laporan dari target 2 laporan, berupa laporan trantibum selama satu tahun. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program dan kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitasnya sehingga hal ini dapat mmenjadi faktor pendorong tercapainya program ini. Namun juga terdapat faktor penghambat yakni Kolaborasi yang kurang baik antara instansi-instansi terkait. Upaya yang dapat dilakukan agar kegiatan tersebut dapat terus mencapai target ialah meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan (Polri, TNI, Satpol PP), pemerintah daerah, dan lembaga terkait melalui forum rutin, rapat koordinasi, dan penyusunan mekanisme kerja Bersama.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target sebesar 95% terealisasi sebesar 95%. Formulasi perhitungan program ini adalah persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Program ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan kepala daerah, dengan indikator kegiatan yakni jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Capaian pada tahun ini ialah 3 Lembaga/Organisasi masyarakat dari target 3 lembaga/organisasi masyarakat. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan kegiatan ini adalah menyusun rencana kerja tahunan yang terintegrasi dengan visi dan misi daerah serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Faktor pendorong pada program ini ialah pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut dan faktor penghambatnya ialah keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan target 95 % dan realisasi sebesar 95%. Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, target kinerja ditetapkan sebesar 84%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai sebesar 100% maka persentase capaian kinerja mencapai 123,46%, yang masuk dalam kategori "Sangat

Berhasil". Indikator program ini ialah Persentase Desa Tertib Administrasi Desa yang dapat dilihat dari laporan administrasi Pemerintahan Desa.

Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mempunyai indikator jumlah desa tertib administrasi. Pada tahun ini capaian kegiatan ini sebesar 6 desa dengan target 6 desa. Upaya untuk mencapai hal tersebut ialah mlaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan.

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2025, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Realisasi anggaran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk 2025 secara umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
KECAMATAN NGLUYU	**Rp2.351.214.425,00**	**Rp1.997.697.528,00**	**Rp353.516.897,00**	**84,96%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp2.186.928.025,00**	**Rp1.857.117.028,00**	**Rp329.810.997,00**	**84,92%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp1.379.600,00	Rp1.249.000,00	Rp130.600,00	90,53%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.379.600,00	Rp1.249.000,00	Rp130.600,00	90,53%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.779.500.300,00	Rp1.474.825.076,00	Rp304.675.224,00	82,88%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.776.638.000,00	Rp1.472.835.076,00	Rp303.802.924,00	82,90%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.390.200,00	Rp1.330.000,00	Rp60.200,00	95,67%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp1.472.100,00	Rp660.000,00	Rp812.100,00	44,83%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp78.959.300,00	Rp65.571.645,00	Rp13.387.655,00	83,04%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.123.100,00	Rp3.122.450,00	Rp650,00	99,98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp40.476.350,00	Rp29.489.695,00	Rp10.986.655,00	72,86%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp1.694.500,00	Rp1.425.000,00	Rp269.500,00	84,10%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp28.964.000,00	Rp27.905.500,00	Rp1.058.500,00	96,35%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp2.901.350,00	Rp1.829.000,00	Rp1.072.350,00	63,04%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp101.390.000,00	Rp99.731.100,00	Rp1.658.900,00	98,36%
Pengadaan Mebel	Rp34.650.000,00	Rp33.644.100,00	Rp1.005.900,00	97,10%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp66.740.000,00	Rp66.087.000,00	Rp653.000,00	99,02%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp17.250.000,00	Rp14.675.259,00	Rp2.574.741,00	85,07%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.250.000,00	Rp1.200.000,00	Rp50.000,00	96,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp16.000.000,00	Rp13.475.259,00	Rp2.524.741,00	84,22%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp208.448.825,00	Rp201.064.948,00	Rp7.383.877,00	96,46%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp51.390.900,00	Rp49.143.000,00	Rp2.247.900,00	95,63%
Pemeliharaan Mebel	Rp2.600.000,00	Rp2.600.000,00	Rp0,00	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.920.000,00	Rp2.915.000,00	Rp5.000,00	99,83%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp151.537.925,00	Rp146.406.948,00	Rp5.130.977,00	96,61%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Rp30.962.500,00**	**Rp22.880.500,00**	**Rp8.082.000,00**	**73,90%**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp20.736.100,00	Rp15.637.500,00	Rp5.098.600,00	75,41%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp20.736.100,00	Rp15.637.500,00	Rp5.098.600,00	75,41%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp6.612.800,00	Rp6.093.000,00	Rp519.800,00	92,14%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp3.613.600,00	Rp1.150.000,00	Rp2.463.600,00	31,82%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp3.613.600,00	Rp1.150.000,00	Rp2.463.600,00	31,82%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Rp39.029.200,00**	**Rp36.795.000,00**	**Rp2.234.200,00**	**94,28%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp39.029.200,00	Rp36.795.000,00	Rp2.234.200,00	94,28%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp20.388.450,00	Rp19.555.000,00	Rp833.450,00	95,91%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp18.640.750,00	Rp17.240.000,00	Rp1.400.750,00	92,49%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Rp19.703.600,00**	**Rp17.525.000,00**	**Rp2.178.600,00**	**88,94%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp19.703.600,00	Rp17.525.000,00	Rp2.178.600,00	88,94%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp19.703.600,00	Rp17.525.000,00	Rp2.178.600,00	88,94%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Rp13.537.500,00**	**Rp12.062.500,00**	**Rp1.475.000,00**	**89,10%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp13.537.500,00	Rp12.062.500,00	Rp1.475.000,00	89,10%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Rp13.537.500,00	Rp12.062.500,00	Rp1.475.000,00	89,10%

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Rp61.053.600,00**	**Rp51.317.500,00**	**Rp9.736.100,00**	**84,05%**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp61.053.600,00	Rp51.317.500,00	Rp9.736.100,00	84,05%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp57.890.000,00	Rp48.532.500,00	Rp9.357.500,00	83,84%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp3.163.600,00	Rp2.785.000,00	Rp378.600,00	88,03%
	Rp2.351.214.425,00	**Rp1.997.697.528,00**	**Rp353.516.897,00**	**84,96%**

Sumber : SPJ Fungsional Desember 2025, DPPA 2025 dan LRA 2025

Adapun penyebab tidak dapat terserap atau terlaksananya kegiatan sehingga menyebabkan sisa anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan kelancaran kerja, yang terdiri dari 22 kegiatan dengan anggaran Rp. 2.186.928.025,00 terealisasi Rp. 1.857.117.028,00 atau 84,92%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Hasil program ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat desa dan kelurahan, program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 30.962.500,00 terealisasi Rp. 22.880.500,00 atau 73,90%.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Hasil program ini adalah terwujudnya pembinaan kepada lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat serta gotong royong masyarakat, program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 39.029.000,00 terealisasi Rp. 36.795.000,00 atau 94,28 %.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Hasil program ini adalah terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngluyu , program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.703.600,00 terealisasi Rp. 17.525.000,00 atau 88,94%.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Hasil program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Ngluyu sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 13.527.500,00 terealisasi Rp. 12.062.500,00 atau 89,10 %.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan kinerja di Kecamatan Ngluyu dan pembinaan masyarakat, yang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.053.600,00 terealisasi Rp. 51.317.500,00 atau 84,05%.

Tidak tercapainya target kinerja keuangan secara utuh (100%) disebabkan adanya beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

a. Adanya beberapa capaian yang tidak tercapai seperti pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada yang tidak terserap
b. Adanya efisiensi terhadap penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
c. Adanya kegiatan yang jangka waktu penyelenggaraannya dapat dipadatkan tanpa mengurangi efektifas kegiatan, sehingga kebutuhan anggaran kurang dari rencana yang telah ditetapkan;
d. Keterlambatan Penerbitan SPD berpengaruh pada proses realisasi anggaran.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Ngluyu merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Ngluyu dengan mengacu pada RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ngluyu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Sebagaimana Sasaran mengacu pada Renstra 2024-2026 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan capaian 110,90% Serta Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan capaian kinerja 120 %. Sedangkan mengacu pada Renstra 2025-2029 Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan capaian kinerja 111,64 % berdasarkan PK Perubahan yang mengacu pada renstra 2025-2029. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan capaian 110,90 %, sasaran ke 2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan capaian 120%, dan sasaran ke 3 Meningkatnya Tertib Administrasu Desa dengan capaian 100%.

Mengacu realisasi sampai akhir tahun atau renstra 2025-2029, semua sasaran strategis sudah mencapai target.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Melakukan re-orientasi terhadap program / kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen - dokumen perencanaan dan kinerja;
b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
c. Memberdayakan sumber daya yang ada di kecamatan Ngluyu secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

e. Lebih memperhatikan lagi antara pak pada pengadaan belanja modal daerah (bmd) dan rencana kebutuhan belanja modal daerah (RKBMD) agar tidak terjadi lagi BMD yang tidak dapat di realisasi oleh Kecamatan Ngluyu.
f. Mempertajam kembali dalam penargetan awal dalam renstra, agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh dengan realisasi.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngluyu Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Ngluyu, 06 Februari 2026
CAMAT NGLUYU

IMAM TARMUJI, S.Sos
Pembina Tk. 1
NIP. 19690915 199003 1 011

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA 2025) Ikhtisar DPA
4. Bukti Dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
5. Bukti Dukung seluruh nya di doodle drive : https://drive.google.com/drive/folders/1faU5VKJlDtnlOTuEO2eDllVyobmuj